

KAJIAN PERSEPSI HARAPAN SEKTOR INFORMAL TERHADAP KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN USAHA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOJO UNAUNA

Oleh :
Muzakir ¹⁾

ABSTRAK

Pemberdayaan sektor informal merupakan bagian dari pemberdayaan perekonomian rakyat guna pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Untuk memperbaiki pola pemberdayaan sektor Informal di Kabupaten Tojo Unauna, maka dipandang perlu untuk melihat persepsi harapan para pelaku sektor informal terhadap kebijakan pembedayaan usaha pemerintah daerah kabupaten Tojo Unauna dilihat dari berbagai aspek.

Dalam pelaksanaan penelitian ini tipe penelitian yang digunakan bentuk penelitian deskriptif. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah dipusatkan pada pelaku usaha sektor informal di Kabupaten Tojo Unauna.

Data primer dihimpun melalui observasi dan wawancara langsung dengan responden pemilik usaha (*responden*) dalam kategori sektor informal dengan jumlah sampel 50 responden. Sementara data sekunder dihimpun dari instansi terkait. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis frekwensi & crosstabulasi atas persepsi harapan para pelaku sektor informal terhadap kebijakan pembedayaan usaha

Hasil penelitian menemukan bahwa pola pemberdayaan dengan pemberian pelatihan dalam meningkatkan pendapatan, bantuan modal usaha, cara-cara pengelolaan usaha dan pendampingan usaha sangat diharapkan dari pemerintah. Faktor-faktor meningkatkan pendapatan, bantuan modal usaha, cara-cara pengelolaan usaha dan pendampingan usaha secara simultan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan PAD dari sisi retribusi daerah. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan sektor informal, khususnya pedagang sektor informal berperan positif dalam meningkatkan perolehan/penerimaan pendapatan pemerintah untuk membiayai pembangunan kota.

Kata Kunci ; Sektor Informal, Persepsi Pelaku Usaha

I. PENDAHULUAN

Istilah sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Tetapi akan menyesatkan bila disebutkan perusahaan berskala kecil, karena sektor informal dianggap sebagai suatu manifestasi situasi pertumbuhan kesempatan kerja di negara sedang berkembang, karena itu mereka yang memasuki kegiatan berskala kecil ini di kota, terutama bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan daripada memperoleh keuntungan. Karena mereka yang terlibat dalam sektor ini pada umumnya miskin, berpendidikan sangat rendah, tidak terampil dan kebanyakan para migrant (pendatang), jelaslah bahwa mereka bukanlah kapitalis yang mencari investasi yang menguntungkan dan juga bukan pengusaha seperti yang dikenal pada umumnya

Saat ini, sektor informal menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan

¹⁾ Staf Pengajar pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako Palu.

ketenagakerjaan. Sektor informal merupakan salah satu alternatif kesempatan kerja yang mampu menampung tenaga kerja tanpa persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan dan keterampilan kerja. Hal ini merupakan salah satu faktor utama yang memudahkan tenaga kerja memasuki sektor ini dan semakin mengukuhkan kehadirannya sebagai penyangga terhadap kelebihan tenaga kerja. Keadaan ini dalam jangka pendek akan dapat membantu mengurangi angka pengangguran di Indonesia (Harahap dan Sri Hastuty 2006).

Pemberdayaan sektor informal merupakan bagian dari pemberdayaan perekonomian rakyat guna pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Dalam beberapa hal, sektor informal lebih dapat beradaptasi dan tidak terganggu oleh manajemen operasional yang kaku. Dalam periode krisis perekonomian nasional, sektor informal yang bersifat adaptif dan lentur, masih tetap bertahan bahkan mampu mengembangkan peluang-peluang usaha dibandingkan dengan perusahaan besar.

Pada dasarnya, apabila seseorang mempunyai kemampuan, memiliki sedikit pengetahuan praktis serta memiliki peralatan yang sederhana dan keuletan berusaha maka ia dapat melakukan usaha dalam sektor informal. Adanya sifat alamiah dan sifat manusia, menyebabkan timbulnya perpindahan penduduk dari daerah yang kurang menguntungkan, seperti daerah pedesaan ke daerah yang lebih menjanjikan, seperti daerah perkotaan atau pusat pertumbuhan baru sebagai tempat bermukim, bekerja, berusaha dan bermasyarakat. Migrasi ini telah menciptakan berbagai macam lapangan usaha baru, seperti keberadaan pekerja sektor informal. Keberadaan pekerja sektor informal turut memberikan sumbangan bagi perkembangan dan kegiatan usaha. Tidak bisa dipungkiri bahwa kegiatan sektor informal tersebut telah memberikan sumbangan yang tidak kecil bagi ekonomi lokal dalam suatu wilayah bahkan di dalam suatu kabupaten dimana terdapatnya sektor informal tersebut. Keadaan ini diharapkan memberikan kontribusi peningkatan pendapatan daerah dan nasional. Oleh karena itu peranan sektor informal mempunyai peran penting dalam mewujudkan tujuan pemerataan pembangunan.

Hutajulu (2004) memberikan batasan tentang sektor informal, adalah suatu bidang kegiatan ekonomi yang untuk memasukinya tidak selalu memerlukan pendidikan formal dan keterampilan yang tinggi, dan memerlukan surat-surat izin serta modal yang besar untuk memproduksi barang dan jasa. Sektor informal memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki.

Sektor informal, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dengan demikian tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan. Selain itu, Sektor informal mempunyai potensi yang cukup besar untuk

memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor penerimaan retribusi daerah seiring dengan kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Berbagai kebijakan dan upaya didalam mendorong tumbuhnya sector informal telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tojo unauna, namun disisi lain perkembangan usaha sector ini relative lambat dari sisi kualitasnya, walaupun secara kuantitas semakin besar dan meliputi berbagai sector usaha. Olehkarena itu perlu ditelusuri sejauhmana keberhasilan kebijakan yang telah ditempuh oleh Pemda Tojo Unauna dan apa harapan pelaku usaha dimasa yang akan datang didalam mengembangkan usaha sector informal ini.

II. MASALAH PENELITIAN

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah secara umum sektor informal memiliki dua masalah pokok yang dihadapi, yaitu *Pertama*, faktor internal sektor informal; yakni berkaitan dengan masalah antara lain adalah rendahnya tingkat sumber daya manusia (pendidikan formal), keterampilan dalam berusaha, kekurangan akses terhadap modal. *Kedua*, faktor eksternal, antara lain terkait dengan kebijakan pemerintah dan pihak lain yang memiliki kaitan dengan sektor-sektor informal. Belum optimalnya peran pemerintah dan pihak lain dalam mendukung keberadaan sektor informal. Kedua hal pokok di atas merupakan faktor-faktor yang berkaitan langsung dengan masalah pemberdayaan sektor informal, yakni masalah pengelolaan faktor manusia, masalah pengelolaan modal, dan masalah pengelolaan manajemen usaha untuk meningkatkan keberadaan dan status usaha dari sektor informal.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam pelaksanaan penelitian ini akan digunakan bentuk penelitian *deskriptif*, ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini 50 pemilik usaha (*responden*) dalam katagori sektor informal. Penentuan

responden (teknik penarikan sampel) melalui *purposive sampling*.

Untuk mengumpulkan data, dilakukan melalui observasi, penyebaran kuesioner, wawancara mendalam dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis Peta persepsi mengenai sektor informal.

IV. HASIL PENELITIAN

4.1. Persepsi Pelaku Usaha

Hasil analisis peta persepsi permasalahan usaha di sektor informal menunjukkan bahwa kondisi ini diduga bersumber dari dua hal pokok, yaitu (1) faktor internal dari pelaku usaha sektor informal itu sendiri; dan (2) faktor eksternal, yakni kebijakan pemerintah dalam pembinaan usaha kecil (termasuk usaha sektor informal). Masalah yang berkaitan dengan faktor internal, di antaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan formal dan keterampilan dalam berusaha; perilaku konsumtif (konsumerisme). Kebanyakan dari mereka belum mempunyai modal sendiri (sumber modal sebagian dari rentenir, dan sebagian dari barang-barang yang dijamakan adalah barang-barang komisi). Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam pembinaan usaha kecil, khususnya usaha sektor informal yang hingga saat ini sebagian besar belum tersentuh dalam memperoleh pembinaan dari pihak-pihak terkait.

Kedua hal pokok di atas merupakan faktor-faktor yang berkaitan langsung dengan masalah pemberdayaan usaha kecil, khususnya pengelolaan usaha sektor informal, yakni masalah pengelolaan, unsur manusia (pelatihan), pengelolaan unsur uang (modal kerja) dan pengelolaan unsur metode (manajemen usaha) dalam upaya meningkatkan pendapatan guna memberikan kontribusi pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil temuan dan penjarangan informasi di lapangan mengenai persepsi responden tentang permasalahan alokasi dana APBD bagi pemberdayaan usaha sektor informal di Kabupaten Tojo Unauna,

ditemukan hal yang menarik dari persepsi responden mengenai alokasi dana APBD. Dari 50 responden usaha sektor informal yang dijadikan sampel, ditemukan 60 persen responden yang mempersepsikan bahwa alokasi dana tersebut sebaiknya jangan dibatasi, sementara 40 persen responden yang mempersepsikan bahwa alokasi dana tersebut sebaiknya dibatasi.

Pelaku usaha sektor informal, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dengan demikian tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan. Selain itu, kelompok pedagang sektor informal mempunyai potensi yang cukup besar untuk memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor penerimaan retribusi daerah seiring dengan kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Persepsi responden mengenai permasalahan retribusi yang dipungut dari pelaku usaha sektor informal di Kabupaten Tojo Unauna mempersepsikan bahwa banyak macam pungutan yang dibebankan/dikenakan bagi usaha sektor informal hanya 1 orang (2%), sementara yang mempersepsikan bahwa tidak banyak pungutan sebanyak 49 orang (98%) dari jumlah responden sebanyak 50 orang.

Pada sisi lain lokasi tempat usaha merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan tingkat perkembangan usaha. Semakin strategis tempat (dekat dengan konsumen) semakin besar perkembangan usaha tersebut ditinjau dari penjualan. Tidak mengherankan usaha sektor informal yang berkembang cepat adanya di pusat-pusat kota. Keberadaan usaha sektor informal disatu sisi dapat memberikan sumbangan/kontribusi dalam PAD tapi disisi lain menjadi bumerang bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan terutama dalam hal pengaturan tempat, tidak jarang kita lihat di kota-kota besar keberadaan usaha ini justru membuat kemacetan, penataan kota menjadi semrawut, sampah tersebar disana-sini, dan lain-lainnya. Persepsi responden masalah tidak adanya tempat khusus bagi usaha ini, Hasil tabulasi

data diperoleh hasil skoring persepsi responden bahwa dari 50 responden terdapat 76% (38 orang) mengatakan bahwa mereka tidak disediakan tempat khusus, sementara mereka yang mempersepsikan bahwa mereka disediakan tempat khusus sebanyak 24% (12 orang).

Dari informasi responden umumnya mereka menginginkan ada tempat khusus disediakan oleh pemerintah. Untuk menjaga keteraturan dalam penataan kota, sektor informal idealnya memang harus ada wadah/tempat khusus atau lebih spesifik lagi ada tempat khusus diikuti dengan hari-hari khusus dan jam-jam khusus mereka berjualan ditempat itu, mengingat usaha ini tergolong usaha kecil dan mudah untuk diangkat atau dipindah-pindahkan.

Permasalahan lain atau permasalahan klasik yang ditemukan dari responden usaha sektor informal adalah 1) kurangnya modal untuk mengembangkan usaha sektor informal dan 2) sulitnya akses ke lembaga permodalan. Kedua permasalahan ini merupakan masalah yang berhubungan langsung (modal dan lembaga permodalan) dan menjadi masalah bagi semua pelaku usaha di sektor informal. Responden sangat besar keinginannya untuk mengembangkan usaha tapi mereka semua terkendala dengan masalah permodalan, sehingga peran pemerintah setempat dituntut dapat proaktif dalam memfasilitasi mereka tentang bagaimana cara dan metode dalam memperoleh modal.

4.2. Harapan Bagi Pemberdayaan Sektor Informal

Berbagai tanggapan dan persepsi responden mengenai apa dan bagaimana harapan mereka dalam meningkatkan pemberdayaan usaha sektor informal, berikut harapan-harapan yang dimaksud:

a. Penyediaan Sarana/Tempat Khusus

Diperoleh informasi mengenai harapan mereka tentang peran pemerintah didalam menyediakan sarana/lapak tempat penjualan khusus. Harapan bagi usaha sektor informal mengenai peran pemerintah dalam menyediakan tempat khusus mempunyai harapan yang beragam. Responden yang

sangat mengharapkan peran tersebut paling dominan yaitu sebanyak 32% reponden, kemudian urutan kedua terdapat 24% reponden g yang tidak mengharapkan adanya tempat khusus bagi pelaku usaha sektor informal, ketiga terdapat 22% reponden yang sangat tidak mengharapkan adanya tempat khusus, keempat ada 16% reponden mengharapkan, dan yang terakhir terdapat 6% reponden yang netral.

b. Pengelolaan Manajemen Usaha

Pemberdayaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemberdayaan kelompok usaha sektor informal sebagai bagian dari masyarakat yang membutuhkan penanganan/pengelolaan manajemen usaha tersendiri dari pihak pemerintah yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya yang mereka miliki, pada gilirannya akan mendorong peningkatan pendapatan/profit usaha.

Mereka mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan daerah dari sektor retribusi daerah. Harapan dari usaha sektor informal yang ada di Kabupaten Tojo Una-una mengenai peran pemerintah dalam melakukan pemberdayaan manajemen pengelolaan usaha berdasarkan hasil wawancara dan jawaban responden mengenai peran pemerintah dalam melakukan pemberdayaan manajemen pengelolaan usaha diperoleh jawaban yang dominan adalah netral yaitu sebanyak 54% artinya mereka tidak terlalu mengharapkan peran tersebut, tetapi jika program itu diadakan mereka umumnya siap untuk diikuti. Kemudian disusul responden yang mengharapkan peran tersebut sebanyak 24% responden, terbanyak ketiga adalah tidak mengharapkan peran tersebut sebanyak 16% responden, dan yang paling kurang adalah 6 % responden yang sangat mengharapkan peran pemerintah dalam pemberdayaan pengelolaan manajemen usaha.

c. Perlindungan usaha

Ketidakteraturannya pengelolaan usaha sektor informal menimbulkan keresahan disana-sini, seperti adanya kemacetan di jalan-jalan poros, sempitnya lahan parkir ditempat-tempat umum dan

sebagainya. Tidak mengherankan jika hampir setiap hari ditayangkan dimedia masa dan elektronik mengenai adanya penggusuran pedagang sektor informal.

Kondisi semacam ini tentu kita semua tidak mengharapkan, sehingga jauh-jauh sebelumnya pemerintah perlu mengayomi atau melakukan perlindungan usaha dengan payung hukum tentang status dan tempat usaha. Bagaimana harapan para pelaku usaha sektor informal tentang perlindungan usaha ini, diperoleh persentase jumlah responden yang sangat mengharapkan adanya perlindungan usaha dari pemerintah di Kabupaten Tojo Una-una adalah sebanyak 32% (16 orang) dari 50 responden usaha sektor informal sebagai sampel. Kemudian untuk responden yang mengharapkan sebanyak 62% (31 orang), sementara yang netral sebanyak 6% (3 orang). Jadi dari dari semua responden yang ada tidak ada seorang pun yang mempunyai harapan untuk tidak dilindungi.

d. Bantuan Peralatan

Jenis dan bentuk peralatan yang digunakan dalam usaha sektor informal bervariasi artinya berbeda setiap jenis usaha. Bentuk peralatan umumnya peralatan sederhana dan diperoleh/dibeli sendiri. Untuk melihat bagaimana sebenarnya harapan usaha sektor informal, mengenai peran pemerintah dalam memberikan bantuan peralatan usaha, adalah netral dan mengharapkan yaitu masing-masing sebanyak 30% responden, yang tidak mengharapkan sebanyak 16% responden, dan sangat mengharapkan 30%, juga sangat mengharapkan 12% dan sangat tidak mengharapkan masing-masing 12% responden.

Rangkuman dari semua jawaban responden tentang item peningkatan pendapatan usaha sektor informal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1
Harapan Responden Mengenai Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Sektor Informal

Peningkatan Pendapatan	Kategori Jawaban	Freq	Prop
Pemerintah menyediakan sarana/lapak (tempat penjualan khusus)	Sangat tidak diharapkan	11	0.22
	Tidak diharapkan	12	0.24
	Netral	3	0.06
	Diharapkan	8	0.16
	Sangat diharapkan	16	0.32
Pemerintah melakukan pemberdayaan manajemen pengelolaan usaha	Tidak diharapkan	8	0.16
	Netral	27	0.54
	Diharapkan	12	0.24
	Sangat diharapkan	3	0.06
Pemerintah melakukan perlindungan Usaha	Netral	3	0.06
	Diharapkan	31	0.62
	Sangat diharapkan	16	0.32
Pemerintah memberikan bantuan peralatan usaha	Sangat tidak diharapkan	6	0.12
	Tidak diharapkan	8	0.16
	Netral	15	0.30
	Diharapkan	15	0.30
	Sangat diharapkan	6	0.12

sumber : Pengolahan data Primer

4.3. Harapan Model Bantuan Permodalan

a. Modal Tunai

Modal adalah merupakan faktor penentu utama dalam dunia usaha khususnya pada usaha sektor informal. Sering kita jumpai begitu banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah masuk pada sektor ini hanya karena masalah modal. Banyak masyarakat yang mempunyai etos kerja yang tinggi tapi tidak memiliki modal yang cukup akhirnya untuk memenuhi keinginannya mereka melakukan pinjaman dengan tingkat bunga yang tinggi. Kondisi ini juga terjadi di Kabupaten Tojo Una-una. Harapan mengenai bantuan modal bagi para pelaku usaha dapat dilihat pada gambar berikut.

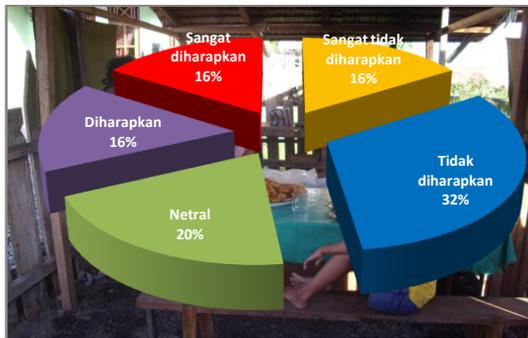
Gambar 1
Harapan Bantuan Modal Tunai



b. Modal Peralatan

Umumnya usaha sektor informal menggunakan peralatan yang sederhana meskipun demikian bukan berarti usaha sektor informal tidak mengharapkan bantuan dari pihak luar. Untuk melihat harapan dari kelompok usaha sektor informal mengenai bantuan modal peralatan dapat dilihat pada gambar berikut.

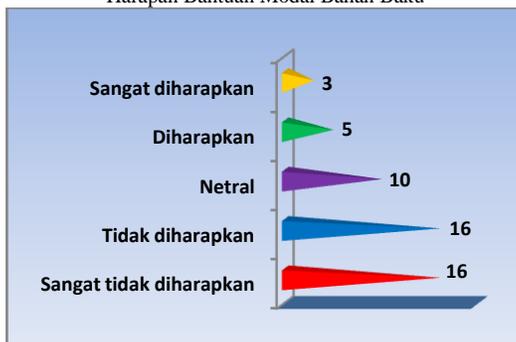
Gambar 2
Harapan Bantuan Modal Peralatan



c. Modal Bahan Baku

Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa bahan baku dari usaha sektor informal sangat beragam serta sumber dan cara memperolehnya pula beragam. Secara umum jenis barang dagangan dari usaha ini terdiri dari dua jenis yaitu barang dagangan makanan dan sejenisnya serta barang dagangan non makanan. Untuk melihat harapan responden mengenai bantuan dalam bentuk modal bahan baku dapat dilihat pada gambar berikut.

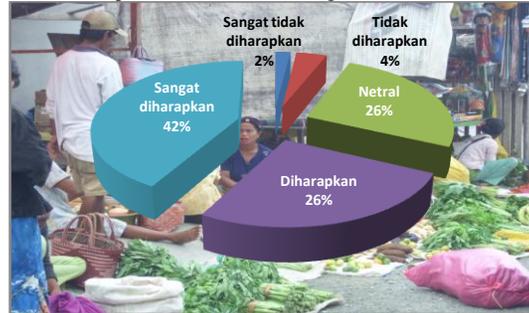
Gambar 3
Harapan Bantuan Modal Bahan Baku



d. Modal Tunai Dan Peralatan

Sumberdaya modal (uang) dan peralatan merupakan faktor produksi yang saling berhubungan artinya kedua faktor tersebut harus ada dalam aktivitas usaha. Harapan responden mengenai bantuan modal (uang) dan peralatan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4
Harapan Bantuan Modal (uang) dan Peralatan

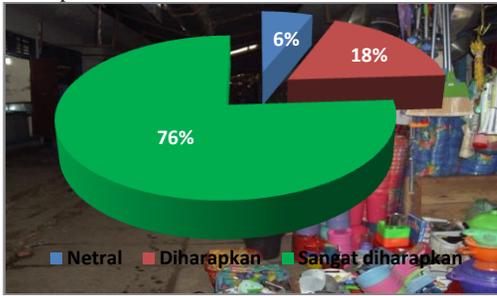


Fenomena-fenomena semacam ini umumnya terjadi di semua daerah dimana para pelaku usaha/pedagang selalu mengharapkan bantuan, disamping bantuan modal (uang tunai) juga mereka mengharapkan bantuan peralatan (mesin). Kondisi demikian juga terjadi di Kabupaten Tojo Una-una, dimana hasil penjarangan data lapangan ditemukan ada sebanyak 21 orang sangat mengharapkan bantuan sejenis itu, sedangkan yang netral dan mengharapkan masing-masing ada sebanyak 13 orang, responden yang tidak mengharapkan ada sebanyak 2 orang, serta hanya 1 responden yang sangat tidak mengharapkan bantuan sejenis itu.

e. Fasilitas Kredit

Masyarakat bawah kebanyakan mereka dalam melakukan pinjaman modal (uang) mengalami kesulitan terutama mengenai pengurusan administrasi dan persyaratan yang berbelit-belit. Untuk melihat harapan responden mengenai bantuan/peran pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat (usaha sektor informal) dalam memperoleh kredit dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 5
Harapan Bantuan Pemerintah dalam Memfasilitasi Kredit



Rangkuman dari semua jawaban item pertanyaan mengenai bantuan modal yang telah diolah dengan metode frekuensi dan dapat dilihat dengan jelas pada tabel berikut.

Tabel 2
Harapan Responden Mengenai Peran Pemerintah Dalam Pemberian Bantuan Modal Usaha Sektor Informal

Modal	Kategori Jawaban	Freq	Prop
Pemerintah membantu modal dalam bentuk tunai	Sangat tidak diharapkan	1	0.020
	Netral	1	0.020
	Diharapkan	10	0.200
	Sangat diharapkan	38	0.760
Pemerintah membantu modal dalam bentuk peralatan	Sangat tidak diharapkan	8	0.160
	Tidak diharapkan	16	0.320
	Netral	10	0.200
	Diharapkan	8	0.160
Pemerintah membantu modal dalam bentuk bahan baku	Sangat tidak diharapkan	16	0.320
	Tidak diharapkan	16	0.320
	Netral	10	0.200
	Diharapkan	5	0.100
Pemerintah membantu modal dalam bentuk tunai dan peralatan	Sangat tidak diharapkan	1	0.020
	Tidak diharapkan	2	0.040
	Netral	13	0.260
	Diharapkan	13	0.260
Pemerintah memfasilitasi dalam mendapatkan kredit	Sangat diharapkan	21	0.420
	Netral	3	0.060
	Diharapkan	9	0.180
	Sangat diharapkan	38	0.760

4.4. Harapan Pola Pemberdayaan Oleh Pemda

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian (pemerintah) sebagai pihak yang memberdayakan.

Masyarakat menentukan jenis usaha, yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.

Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Dengan demikian, pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban dan lain-lain yang merupakan bagian pokok dari upaya pemberdayaan itu sendiri.

Pemberdayaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemberdayaan usaha sektor informal, sebagai bagian dari masyarakat yang membutuhkan penanganan/pengelolaan tersendiri dari pihak pemerintah yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya yang mereka miliki yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan pendapatan/profit usaha sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan

pendapatan daerah dari sektor retribusi daerah. Secara rinci pemberdayaan yang dimaksud dalam kajian ini terangkum dari semua item pertanyaan yang diajukan dan yang telah diolah dengan metode frekuensi dapat dilihat dengan jelas pada tabel berikut.

Tabel 3
Harapan Responden Mengenai Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Sektor Informal

Pemberdayaan	Kategori Jawaban	Freq	Prop
Pemerintah memberikan pelatihan teknis produksi	Sangat tidak diharapkan	9	0.180
	Tidak diharapkan	14	0.280
	Netral	18	0.360
	Diharapkan	8	0.160
	Sangat diharapkan	1	0.020
Pemerintah memberikan pelatihan kewirausahaan	Tidak diharapkan	1	0.020
	Netral	18	0.360
	Diharapkan	26	0.520
	Sangat diharapkan	5	0.100
Pemerintah memfasilitasi pelatihan teknis pembukuan	Sangat tidak diharapkan	2	0.040
	Tidak diharapkan	5	0.100
	Netral	20	0.400
	Diharapkan	17	0.340
	Sangat diharapkan	6	0.120
Pemerintah memberikan penyuluhan tentang teknis produksi	Sangat tidak diharapkan	26	0.520
	Tidak diharapkan	8	0.160
	Netral	12	0.240
	Diharapkan	3	0.060
	Sangat diharapkan	1	0.020
Pemerintah memfasilitasi pendamping usaha	Tidak diharapkan	8	0.160
	Netral	15	0.300
	Diharapkan	20	0.400
	Sangat diharapkan	7	0.140

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan antara lain:

1. Masih terdapat pedagang sektor informal yang belum dikenakan/melakukan pembayaran retribusi pasar dan kebersihan. Jika ini terpenuhi maka sangat signifikan dapat meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD).
2. Pelaku usaha sektor informal di Kabupaten Tojo Unauna umumnya berlokasi di sekitar pasar dan di jalan-jalan poros, dan sebagian dari mereka

mengharapkan pemerintah dapat menyediakan tempat khusus.

3. Pemberian pelatihan dalam meningkatkan pendapatan, bantuan modal usaha, cara-cara pengelolaan usaha dan pendampingan usaha sangat diharapkan dari pemerintah.
4. Faktor-faktor meningkatkan pendapatan, bantuan modal usaha, cara-cara pengelolaan usaha dan pendampingan usaha secara simultan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan PAD dari sisi retribusi daerah. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan sektor informal, khususnya pedagang sektor informal berperan positif dalam meningkatkan perolehan/penerimaan pendapatan pemerintah kota Ampaña untuk membiayai pembangunan kota.

VI. REKOMENDASI

Mengacu pada beberapa temuan dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan beberapa rekomendasi sebagai solusi dalam memecahkan masalah pedagang sektor informal, di antaranya :

1. Mengingat belum seluruhnya pelaku usaha sektor informal diikutkan dalam program pemberdayaan, maka diperlukan upaya-upaya konkrit dari pemerintah kota dan instansi terkait sebagai mitra kerja, termasuk LSM untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan sektor informal, agar tercipta perbaikan kondisi usaha yang lebih baik bagi sektor informal untuk mengembangkan usahanya.
2. Untuk menghindari kemacetan lalu-lintas di pusat kota sekaligus menjaga keindahan, keasrian dan kebersihan kota, maka diperlukan penataan lokasi usaha sektor informal (terutama PKL) berdasarkan jenis barang/bahan yang dijual.
3. Untuk menumbuhkembangkan sektor informal maka pemerintah haruslah secara konsisten mengeluarkan kebijaksanaan yang berpihak kepada mereka. Disamping itu kerja sama antara

pengusaha besar/sedang dan sektor informal dibutuhkan dengan berpatokan kepada konsep *win-win solution*. Potensi ekonomi Kabupaten Tojo Una-una yang paling menonjol adalah pertanian.

Untuk itu Agribisnis dan Agroindustri harus mendapat perhatian yang serius dari semua pihak karena sektor inilah yang paling potensial di Tojo Unauna dan paling banyak diminati oleh masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aczel, Amir D**, 2000. *Complete Business Statistics*, Fourth Ed. McGraw Hill International Edition.
- Al-Rasyid, Harun** 2001, *Teknik Penarikan Sampel dan Penyusunan Skala*, Bahan Kuliah, Pascasarjana-UNPAD, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tojo Unauna**, 2009. Kabupaten Tojo Unauna Dalam Angka, 2008 Kerjasama Bappeda Kabupaten Tojo Unauna dengan BPS Kabupaten Tojo Unauna,
- Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Tengah**,. Sulawesi Tengah Dalam Angka, 2008 Kerjasama Bappeda Tingkat I dengan BPS Propinsi Sulawesi Tengah, 2009.
- Breman**, 2004, Kerja dan Kehidupan Buruh Tani di Pesisir Jawa, Jakarta
- Fransiska R. Korompis**, 2005, Pemberdayaan Sektor Informal : Studi Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan PAD di Kota Manado, Manado
- Manning dan Tadjuddin**, Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota, Jakarta 2005
- McGee**, 2003, Perombakan Struktural dan Kota di Dunis Ketiga, Suatu Teori Involusi Kota, Jakarta
- Prijono dan Pranarka, dalam Fransiska R**, 2005, Pemberdayaan Sektor Informal, Manado
- Rachbini dan Hamid**, 2006 Ekonomi Informal Perkotaan, Jakarta
- Ranis**, 2006, The Dual Economy Framework: Relevance on Asian Development, Manila
- SPSS Inc.** (2008). *SPSS for Windows (Version 16.0)*. Chicago: SPSS Inc.
- Sekaran, Uma**, 2000. *Research Methods For Business, A Skill-Building Approach*, Third Edition, Jonh Wiley & Sons, Inc.
- Sethurahman**, 2005, Urbanization and employment in Jakarta,
- Sumodiningrat, Sudarsono, Suparmoko, dalam Fransiska R**, Pemberdayaan Sektor Informal : Studi Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan PAD di Kota Manado, Manado 2005
- Wirosardjono**, 2004, Sektor Informal Sebagai Bumper pada Masyarakat Kapitalis, Jakarta